

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar pemerintah daerah tidak akan lagi bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi melalui perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian

keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembanguana daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Otonomi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan menciptakan proses atau pola pengambilan keputusan dalam ranah publik yang lebih baik dan demokratis. Kepala daerah sebagai tampuk pemimpin tertinggi di daerah bertugas memastikan tercapainya tujuan tersebut, melakukan penyelenggaraan pemerintah yang baik, menggali seoptimal mungkin potensi daerah, dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya

dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus di buat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan tersebut untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan

menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, disamping meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Salah satu cara menilai kinerja pemerintah adalah dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan yang telah dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga kemampuan keuangan daerah yang memadai. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya baik berarti daerah memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya (Sularso & Restianto, 2011).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi

program atau kegiatan. Ada tiga tujuan pengukuran kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2002:121) yaitu: pertama, pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja pada akhirnya akan digunakan untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan daerah dapat dinilai dengan menganalisa rasio keuangan terhadap APBD yang disahkan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja sama dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial.

Kabupaten Manggarai adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang sudah menerapkan otonomi daerah dalam melaksanakan urusan

pemerintahannya, dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Manggarai mempunyai wewenang untuk menggali semua potensi sumber daya yang ada di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan langsung dari pemerintah pusat dengan tujuan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut ini akan disajikan Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020

Akun	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Daerah	1.097.948.217.140	1.229.400.675.074	1.156.337.467.137
Pendapatan Asli Daerah	89.904.635.200	103.585.928.126	96.873.499.070
Dana Perimbangan	807.048.799.228	880.007.846.510	791.615.772.467
Lain-lain Pendapatan yang Sah	51.487.747.250	67.819.270.911	241.284.054.544
Belanja Daerah	1.140.224.665.490	1.097.554.789.168	1.141.487.429.304
Belanja Pegawai	414.310.470.633	445.345.668.863	466.134.022.708
Belanja Barang Jasa	216.715.203.309	253.641.991.847	204.753.689.768
Belanja Modal	270.097.299.924	260.133.775.217	206.921.382.491
Belanja Lainnya	196.431.815.302	228.221.501.420	263.678.334.337
Pembiayaan	29.029.488.206	19.238.734.054	48.333.920.021
Penerimaan Pembiayaan	50.009.488.206	28.998.734.054	60.798.358.974
Pengeluaran Pembiayaan	20.980.000.000	9.750.000.000	12.464.438.953

Sumber : LHP Kabupaten Manggarai 2018-2020 (Data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan setiap tahunnya mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 realisasinya adalah Rp. 1.097.948.217.140, tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp. 1.229.400.675.074, sementara ditahun 2020

terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 1.156.337.467.137. Pada tahun 2018-2019 penerimaan pendapatan asli daerah sangat baik sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pendapatan daerah diakibatkan oleh adanya bencana covid-19. Adapun belanja daerah juga jika dilihat dari data tabel 1.1 di atas belanja setiap tahunnya mengalami naik turun (*fluktuasi*) dimana pada tahun 2018-2019 belanjanya mengalami penurunan dan ditahun 2019-2020 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai belanja daerah lebih diarahkan untuk belanja pegawai dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan sedangkan untuk belanja modalnya mengalami penurunan yang sangat besar setiap tahunnya. Begitu juga pembiayaan daerah setiap tahun dari data diatas dimana pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan terhadap pembiayaan daerah, sementara ditahun 2019-2020 pembiayaan daerah mengalami peningkatan.

Adapun Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Manggarai terdapat permasalahan umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain : 1). Perlu adanya beberapa pembenahan sistem dalam pengelolaan pendapatan; 2). Diperlukan adanya peningkatan pengawasan terhadap perolehan pendapatan; 3). Diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan pendapatan; 4). Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyeteroran pajak; dan 5). Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data

omset yang sebenarnya. Hal ini disebabkan Kurangnya komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademis, maupun masyarakat serta minimnya kerjasama (kolaborasi) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan dan pengelolaan pendapatan; dan juga kurangnya keakurasian data potensi pajak dan kurang konsisten dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan; dan kurangnya pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

Sedangkan belanja daerah lebih diarahkan untuk belanja pegawai dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang secara signifikan bahkan hampir setengah dari pendapatan daerah sedangkan belanja modalnya mengalami penurunan sangat besar setiap tahunnya. Terkait dengan pembiayaan daerah, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu penerimaan pembiayaan perlu dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kebutuhan penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

Brian Sagay (2013) Hasil penelitian tentang kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Minahasa Selatan, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola pendapatannya belum baik ini dilihat dari varian pendapatan yang menunjukkan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target. Kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran belanja sudah cukup baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan. Mandey dan Rotinsulu (2015) Hasil penelitian tentang analisis kinerja pendapatan asli daerah dikaitkan dengan belanja daerah pada pemerintah kota Bitung, dalam penelitiannya bahwa kinerja pemerintah kota Bitung dalam khususnya pada PAD dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun.

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 - 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 - 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 - 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

a Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya keuangan daerah dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya terkait masalah yang sama.

b Manfaat Praktis

1. Penelitian ini berguna sebagai sarana berlatih menulis sekaligus menambah wawasan penulis sebagai bekal dikemudian hari.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten manggarai dalam mengatasi masalah-masalah yang ada.